

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan negara sangat penting bagi bendahara atau calon bendahara agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melaksanakan tugas mengelola uang negara. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Wujud dari pengelolaan keuangan negara setiap tahun adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember. Sedangkan, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBN dibuat untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara dirumuskan pengertian Perbendaharaan

Negara untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan APBN dan APBD.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki salah satu wewenang yaitu untuk menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menunjuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah yang mengelola secara langsung pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. KPPN Cilacap sebagai Kuasa BUN memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah.

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi, KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah bertanggung jawab melaporkan APBN yang penyalurannya melalui KPPN Cilacap dengan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul "Sistem Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap. Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Sistem Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah) pada KPPN Cilacap.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat ingin untuk mengetahui dan mengupas bagaimana Sistem Pelaporan Keuangan UAKBUN-Daerah pada KPPN Cilacap.

## **1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

b. Maksud Praktik Kerja Lapangan:

- 1) Untuk memahami dan mengetahui secara langsung sistem pembuatan laporan keuangan unit akuntansi bendahara umum negara daerah pada KPPN Cilacap

- 2) Untuk melengkapi syarat kelulusan studi pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

c. Tujuan Praktik Kerja Lapangan:

- 1) Untuk mencari pengalaman kerja, mengimplentasikan ilmu dan meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi.
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem akuntansi pemerintah khususnya mengenai laporan keuangan unit akuntansi keuangan bendahara umum negara daerah pada KPPN Cilacap
- 3) Untuk memperoleh gambaran pekerjaan secara nyata mengenai teori sistem akuntansi pemerintah yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya mengenai praktik sistem akuntansi pemerintah pada KPPN Cilacap.

d. Manfaat Praktik Kerja Lapangan:

a) Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mendalami ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dibidang akuntansi pemerintah.
- 2) Sebagai sarana untuk menganalisis dan membandingkan mengenai ilmu teori yang didapat dengan hasil praktik kerja lapangan yang sesungguhnya di dunia pekerjaan.
- 3) Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan menambah relasi dalam lingkup kerja yang profesional

- 4) Sebagai sarana untuk melatih dan meningkatkan kemampuan *softskill* di dunia kerja
  - 5) Sebagai bahan untuk menyusun tugas akhir
- b) Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 1) Sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kurikulum dan silabus yang dapat menghasilkan lulusan yang lebih profesional di bidangnya.
  - 2) Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas lulusan tenaga ahli madya yang terbaik khususnya Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  - 3) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan KPPN Cilacap
  - 4) Sebagai hasil dari praktik kerja lapangan yaitu menghasilkan Tugas Akhir yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan baik internal maupun eksternal.
- c) Manfaat Bagi Instansi Praktik Kerja Lapangan
- 1) Mendapatkan sudut pandang atau penilaian secara nyata mengenai kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto khususnya Akuntansi DIII.
  - 2) Sebagai suatu bentuk partisipasi dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia.

#### 1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Karena keterbatasan penulis, maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada sistem pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi keuangan bendahara umum negara-daerah (UAKBUN-D) pada KPPN Cilacap.

#### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan sumber data sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KPPN Cilacap. Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan. Penulis memperoleh

sumber sumber pendukung pembuatan Tugas Akhir yang berhubungan dengan Sistem Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap pada saat PKL.

## 2) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan dengan Pelaksana Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (Veraki) yang berhubungan langsung dengan data yang diperlukan.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara pada KPPN Cilacap. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang dapat meningkatkan kualitas dalam pengumpulan data. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Dokumentasi

Pengambilan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data yang terdapat dalam buku catatan, serta diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen yang terdapat pada KPPN Cilacap yang berhubungan erat dengan Sistem Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D).

## 2) Studi Pustaka

Pengambilan data dengan metode studi pustaka diperoleh dengan buku-buku yang ada di KPPN Cilacap. Studi pustaka menjadi bagian yang penting dalam kegiatan penelitian karena memberikan informasi mengenai Sistem Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D).

## 1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan PKL

No	Kegiatan	November				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>																					
1.	Observasi ke lokasi PKL																				
2.	Meminta surat permohonan izin PKL dari fakultas																				
3.	Konfirmasi persetujuan izin PKL																				
4.	Mengajukan judul TA																				
<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>																					
5.	Melaksanakan PKL																				
6.	Observasi dan praktik langsung berkaitan dengan judul TA																				
7.	Wawancara dengan pegawai sesuai judul TA																				
<b>TAHAP PELAPORAN</b>																					
8.	Meminta beberapa dokumen untuk dianalisis dan dipelajari terkait dengan judul TA																				
9.	Membuat Laporan TA																				

Sumber: Panduan Laporan Tugas Akhir 2020